



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 188/177/432.013/2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/K.1/8/2018;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.23/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018;

25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018;
27. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018;
28. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018;
29. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/Prt/M/2018;
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/PP.210/7/2018;
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018;
33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016;
36. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2016;
37. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 38 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Umum Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 20 Februari 2019

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,

TTD

RAJA'E